



LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK

Coral Reef Rehabilitation and
Management Program – Coral
Triangle Initiative (COREMAP-CTI)
World Bank 2019 - 2022



Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan izinnya sehingga *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) dapat terlaksana dan laporan dapat diselesaikan dengan baik.

Sepanjang pelaksanaannya, COREMAP-CTI telah memberikan dampak dan hasil yang sangat baik, terutama dalam pengelolaan Kawasan konservasi perairan. Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya ekosistem pesisir telah berhasil dilakukan selama COREMAP-CTI. Peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan melalui literasi kelautan dan diplomasi ilmiah.

Dalam konteks pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kontribusi ilmiah, kontribusi COREMAP-CTI juga mendapat perhatian yang cukup besar.

Kami berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya masyarakat masyarakat sekitar pesisir. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam program ini.

Jakarta, 30 Juni 2022

Dr. Sri Yanti, JS, MPM

Direktur Kelautan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas

Ringkasan Eksekutif



Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) dimulai pada tahun 1998 untuk mendukung pemantauan ekosistem dan proyek pelengkap secara penuh yang dapat meningkatkan

konservasi ekosistem pesisir. COREMAP dirancang dalam tiga fase: (1) Inisiasi; (2) Akselerasi; dan (3) Pelembagaan. Tujuan dari Laporan Penyelesaian Implementasi (ICR) COREMAP-CTI ini adalah untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja COREMAP-CTI yang dibiayai oleh Bank Dunia, termasuk tantangan yang dihadapi oleh Badan Pelaksana Proyek selama pelaksanaan COREMAP-CTI dari tahun 2017 hingga 2022.

Tujuan dari *Project Completion Report* (PCR) adalah untuk memberikan penilaian secara komprehensif terhadap kinerja COREMAP-CTI yang dibiayai oleh GEF melalui Bank Dunia, termasuk permasalahan dan permasalahan yang dihadapi oleh Project Implementing Agency. COREMAP-CTI memiliki tiga komponen, yaitu (1) Penguatan Kelembagaan Pemantauan Ekosistem Pesisir; (2) Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir Berbasis Permintaan; dan (3) Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas. Komponen 1 dan komponen 2 dilaksanakan oleh LIPI/BRIN dan komponen 3 dilaksanakan oleh Bappenas-ICCTF. Sejumlah capaian COREMAP-CTI komponen 3 terlihat dari rangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan ekosistem laut, pendidikan, dan penelitian ilmiah, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembentukan mata pencaharian berkelanjutan. Pelaksanaan program ini melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi.

Komponen 3: Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas:

- **Sub-komponen 3.1. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut dan konservasi spesies terancam:**
 - Sembilan aset infrastruktur ekowisata selesai dibangun.

- Tambahan 5 infrastruktur yang dibangun oleh proyek untuk mendukung perikanan dan mata pencaharian selesai pada tahun 2021.
- Sebanyak 21 kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Nasional Cetacea, Hiu, dan Pari telah dilaksanakan termasuk pengambilan sampel genetik dan penandaan satelit cetacea; penilaian populasi pari manta; lokakarya sosialisasi, penyadaran, dan pendidikan; studi kelayakan pengembangan pariwisata berbasis spesies; dan melakukan pelatihan tentang cara penanganan mamalia laut yang terdampar.

- **Sub-komponen 3.2. Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu (ICZM):**

Sebanyak 17 kegiatan dari Rencana Aksi ICZM Papua Barat telah selesai atau sedang berjalan, meliputi: pelatihan peningkatan kapasitas untuk pengawasan masyarakat; rehabilitasi ekosistem mangrove; sertifikasi selam untuk pengelola KKP; keputusan kabupaten untuk perlindungan sistem tenurial bagi kelompok masyarakat adat; peningkatan kapasitas untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA); dan lokakarya sosialisasi, penyadaran, dan pendidikan.

- **Sub-komponen 3.3. Penatagunaan sumber daya pesisir oleh masyarakat:**

Sebanyak 22 kelompok pengawasan masyarakat (POKMASWAS) di Papua Barat dan Laut Sawu telah resmi terdaftar dan melakukan patroli rutin sejak April 2021 dengan tambahan 1 POKMASWAS terdaftar dan menunggu surat keputusan, sehingga melebihi target akhir proyek 18 kelompok operasional.

Tonny Wagey PhD
Direktur Eksekutif ICCTF

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	6
BAB 1. PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan Proyek	9
1.3 Pemangku Kepentingan dan Penerima Manfaat Proyek	9
BAB 2. PENDEKATAN PROYEK	12
2.1 Gambaran Umum	12
2.2 Lingkup Proyek	13
2.3 Pembiayaan Proyek	15
2.4 Pengaturan Pelaksanaan Proyek	16
BAB 3. CAPAIAN PROYEK	18
3.1 PDO 3: Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP)	18
3.1.1 Aset infrastruktur ekowisata kecil, dibangun di kawasan KKP sasaran, sesuai rencana pengelolaan KKP	20
3.1.2 Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang melakukan pengawasan rutin di wilayah KKP sasaran	22
3.1.3 Kegiatan rencana aksi ICZM provinsi dilaksanakan di kawasan KKP sasaran	25
3.1.4 Jumlah tujuan pengelolaan dari Rencana Aksi Nasional KKP yang telah dilaksanakan untuk Hiu, Cetacea, dan Pari Manta di wilayah KKP sasaran	27
3.2 Hasil-hasil Antara Proyek	32
BAB 4. PELAJARAN YANG DIDAPAT	34
4.1. Manajemen Proyek	34
4.2. Hasil dan Dampak dari Proyek	36
4.3. Keberlanjutan Proyek dan Strategi Penyelesaian	36
BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
5.1. Kesimpulan	39
5.2. Rekomendasi	40
Capaian	41

Daftar Tabel

Tabel 1. Kumulatif Pengeluaran dan Pembiayaan Proyek untuk Komponen Proyek	15
Tabel 2. Hasil Efektivitas Pengelolaan KKP Tahun 2020	19
Tabel 3. Hasil Penilaian Mandiri EVIKA Tahun 2021	19
Tabel 4. Infrastruktur Ekowisata di KKP Sasaran	20
Tabel 5. Penerima Manfaat Kegiatan Infrastruktur	21
Tabel 6. Kegiatan yang Selaras dengan Rencana Aksi ICZM untuk Papua Barat	25
Tabel 7. Kegiatan yang Dilaksanakan untuk RAN Cetacea	28
Tabel 8. Kegiatan yang dilaksanakan untuk RAN Pari Manta	29
Tabel 9. Kegiatan yang dilaksanakan untuk RAN Hiu	31
Tabel 10. Kerangka Hasil Program COREMAP-CTI 2022	32

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Laut Nasional Kepulauan Raja Ampat	13
Gambar 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Nasional di Waigeo Barat	13
Gambar 3. Area Taman Pulau-Pulau Kecil di Raja Ampat	14
Gambar 4. Area Taman Pulau-Pulau Kecil di Laut Sawu	14
Gambar 5. Infrastruktur yang dibangun oleh penerima hibah. Kiri atas dan kanan: Pusat informasi di Oesina, Kupang; Kanan bawah: Pusat informasi di Yelu, Misool;; Misool; Lower right: Information center in Small Meosar	22
Gambar 6. Infrastruktur yang dibangun oleh penerima hibah. Sisi kiri: menara pengamatan Cetacea, Naikean; Kanan atas: Stasiun Pengamatan Manta, Meosar; Kanan bawah: Jalur pendakian ke danau ubur-ubur, Misool	22
Gambar 7. Lokasi menara pengintai dan gambar kapal pengintai	23
Gambar 8. Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas. Atas: Kegiatan pengawasan di Raja Ampat; Bawah: Kegiatan pengawasan di Rote Ndao	24
Gambar 9. Frekuensi ditemukannya penangkapan ikan destruktif saat patroli pengawasan Pokmaswas di tiga kecamatan di TNP Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Kiri atas: Kabupaten Rote Ndao; Kiri bawah: Kabupaten Manggarai; Kanan: Sumba Barat Daya	24



BAB 1.

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang terletak di dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dari laut dan pesisir yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Dalam hal ini perikanan, ekowisata, industri farmasi, dan keberadaan pulau-pulau kecil yang bergantung pada kondisi ekosistem pesisir. Misalnya, terumbu karang dapat memasok ikan dan senyawa metabolit sekunder untuk penemuan obat. Padang lamun juga menjadi habitat penyedia ikan setelah terumbu karang. Hutan mangrove juga sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati laut, seperti ikan, krustasea, moluska, dan makhluk laut lainnya. Selain itu, ketiga ekosistem tersebut saling terhubung, yang berarti degradasi satu habitat dapat berdampak pada habitat lainnya. Mereka juga sangat berkontribusi dalam melindungi pulau-pulau dari abrasi dan efek buruk pemanasan global, terutama kenaikan permukaan laut. Sekitar 60 juta orang tinggal di wilayah pesisir Indonesia, yang berjarak 30 km dari terumbu karang, dan bergantung pada ekosistem untuk

mata pencaharian mereka dan sebagai sumber makanan penting selama beberapa abad.

Namun, perluasan jaringan perdagangan global dan permintaan yang semakin besar untuk produk yang berasal dari ekosistem terumbu karang telah meningkatkan eksploitasi dan memengaruhi keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Tekanan ini diperparah dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan, terutama di wilayah pesisir, dan isu-isu global seperti perubahan iklim dan pengasaman laut. Pelestarian ekosistem pesisir sangat penting, mengingat keuntungan besar yang didapatkan dari keberadaannya.

Salah satu elemen dasar konservasi adalah data terpercaya yang diperoleh melalui pemantauan berkala. Elemen ini akan menginformasikan apakah ekosistem tetap sama atau berubah selama periode pengelolaan. Oleh karena itu, rezim pengelolaan dapat sangat mempertimbangkan hal tersebut untuk menanggapi kondisi

ekosistem. Dalam hal ini, pertimbangannya harus menekankan pada kelestarian ekosistem dan manfaat bagi masyarakat lokal.

Pemantauan kesehatan terumbu karang telah dilakukan sejak tahun 1993 atas inisiatif dari Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) yang didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) dimulai pada tahun 1998 untuk mendukung pemantauan ekosistem dan proyek pelengkap lainnya secara penuh yang dapat meningkatkan konservasi ekosistem pesisir. COREMAP dirancang dalam tiga fase: (1) Inisiasi; (2) Akselerasi; dan (3) Pelembagaan. Tahap ketiga dilaksanakan dalam periode 2017 hingga 2022,

dengan kegiatan di bawah hibah dilaksanakan oleh ICCTF pada 2019 hingga 2022.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja COREMAP-CTI yang dibiayai oleh Bank Dunia (WB), khususnya kegiatan hibah, termasuk isu dan tantangan yang dihadapi oleh project implementing unit. Sejumlah capaian telah terlihat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, meliputi pengamatan ekosistem laut, pendidikan, dan penelitian ilmiah, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembentukan mata pencaharian yang berkelanjutan. Secara garis besar, program ini telah memberikan banyak manfaat dalam bidang pelestarian ekosistem pesisir. Laporan ini akan focus pada pencapaian program COREMAP – CTI komponen 3 yang dilaksanakan oleh ICCTF.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan keberlanjutan dari ekosistem pesisir. COREMAP-CTI Tahap 3 (2017-2022) bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi berbasis bukti tentang pengelolaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Secara umum, program ini bertujuan untuk

melembagakan pendekatan yang terbentuk pada fase-fase proyek sebelumnya sehingga dampak kegiatan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada komponen 3, tujuan pelaksanaan program COREMAP-CTI ini adalah untuk melestarikan terumbu karang serta ekosistem vital terkait melalui peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan.

1.3 Pemangku Kepentingan dan Penerima Manfaat Proyek

Selain Bank Dunia, pelaksanaan program COREMAP-CTI juga didukung oleh Asian Development Bank (ADB). ADB mendukung pengelolaan terumbu karang berkelanjutan di tiga lokasi di wilayah Sunda Kecil, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Nusa Penida, Bali; Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Gili Matra, dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu di Nusa Tenggara Barat. Program ini berlangsung dari Maret 2020 hingga Desember 2022.

Pelaksanaan program COREMAP-CTI akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat global pada umumnya. Dokumen ini mengidentifikasi empat kategori penerima manfaat proyek di Indonesia, misalnya pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.

a. Pemerintah

Penerima manfaat pemerintah akan mencakup tingkat pemerintah pusat dan daerah yang mencakup:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan KKP
- Peningkatan ketersediaan fasilitas infrastruktur untuk pemantauan dan penelitian.
- Meningkatkan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas dan konservasi spesies terancam.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

b. Masyarakat sipil

Penerima manfaat masyarakat sipil akan mencakup masyarakat dan organisasi pesisir yang mendapat manfaat dari dampak jangka panjang dari peningkatan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir, termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran akan sumber daya ekosistem pesisir dan pengelolaannya.

c. Akademisi

Penerima manfaat akademik termasuk universitas negeri dan swasta, termasuk

- Peningkatan partisipasi dan dukungan teknis untuk survei ekosistem pesisir dan pelatihan terkait.
- Peningkatan kapasitas konservasi spesies terancam

d. Masyarakat

Penerima manfaat masyarakat meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan terkait pengawasan, pemantauan dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk pembentukan ekowisata berbasis masyarakat.



Bab 2.

Pendekatan Proyek



2.1 Gambaran Umum

Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) mewakili Tahap Ketiga dari program ini. Tahap Ketiga ini bertujuan untuk melembagakan pendekatan-pendekatan yang ditetapkan di fase sebelumnya untuk memastikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Proyek ini telah melalui dua proses restrukturisasi. Restrukturisasi pertama dilakukan pada 2017 dengan mengganti lembaga pelaksana pembiayaan pinjaman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedua, pada tahun 2018, dalam rangka memperkenalkan kembali upaya peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas dan mengganti lembaga pelaksana pembiayaan Hibah *Global Environment Facility (GEF)* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke BAPPENAS dengan *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* sebagai satuan pelaksana.

Tujuan pengembangan proyek awal (*Project Development Objective - PDO*) ditujukan untuk melembagakan pendekatan

COREMAP-CTI sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan, terdesentralisasi, dan terintegrasi untuk pengelolaan sumber daya terumbu karang, sistem ekologi, dan keanekaragaman hayati terkait untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten terpilih di setiap provinsi di Indonesia. Setelah restrukturisasi, PDO disesuaikan agar lebih mencerminkan mandat dan fungsi LIPI sebagai lembaga penelitian. PDO baru bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi pengelolaan sumber daya berbasis bukti, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Selanjutnya, PDO tersebut diturunkan menjadi empat komponen utama kegiatan, yaitu (1) Penguatan Kelembagaan Pemantauan Ekosistem Pesisir; (2) Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Berbasis Permintaan; (3) Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas; dan (4) Manajemen Proyek.

Dalam konteks kegiatan hibah, PDO yang direvisi masih relevan dengan PDO asli yang mendukung

pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat di lokasi sasaran, sebagaimana tercermin dalam Komponen Proyek 3. Restrukturisasi kegiatan hibah juga menghasilkan pengaturan implementasi yang memungkinkan ICCTF untuk memberikan pendanaan kepada LSM dan organisasi lain untuk melaksanakan paket kerja yang ditetapkan di tingkat masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi laut. Revisi komponen 3 juga

mencerminkan target dari komponen 3 awal yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendirian perusahaan yang berkelanjutan pada target lokal. Pada komponen 3 yang direvisi, fokusnya lebih luas dengan target tambahan untuk mendukung kebijakan nasional tentang pelaksanaan rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir terpadu dan rencana aksi nasional untuk spesies yang terancam punah.

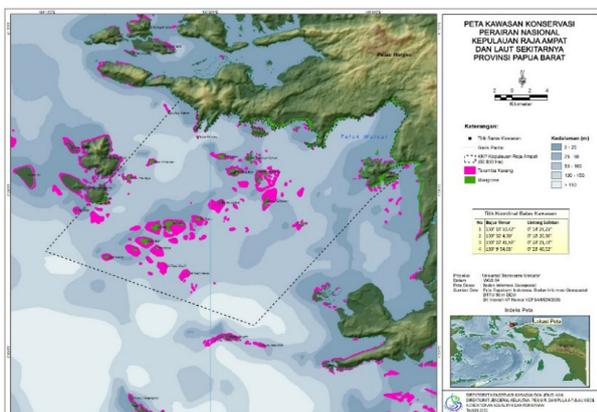
2.2 Lingkup Proyek

Secara umum, kegiatan dan keluaran utama dari program ini adalah:

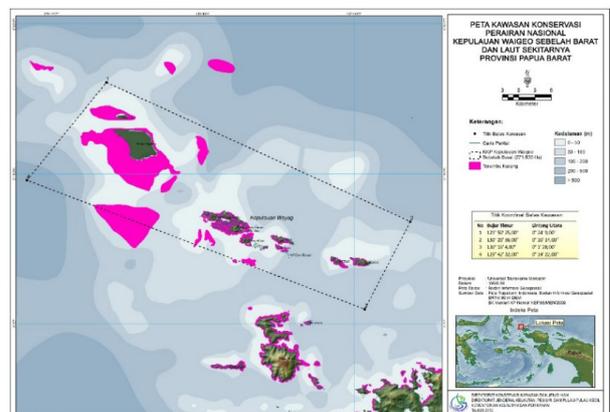
1. Pelatihan dan sertifikasi pemantauan dan pengelolaan ekosistem pesisir bagi staf teknis unit pemantauan dan pengelolaan ekosistem pesisir sub-nasional
2. Infrastruktur untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas
3. Infrastruktur untuk pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir
4. Sosialisasi pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir
5. Infrastruktur atau aset kecil untuk mendukung ekowisata di sasaran KKP
6. Penguatan Kelompok Pengawas Masyarakat yang melakukan patroli rutin di KKP sasaran

7. ICZM Provinsi dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan rencana aksi di ICZM
8. Rencana Aksi Nasional dilaksanakan untuk spesies prioritas di sasaran KKP

ICCTF melaksanakan kegiatan Komponen 3 di empat KKP sasaran, yaitu TNP Laut Sawu (Nusa Tenggara Timur); KKP/SAP Raja Ampat (Papua Barat); KKP/SAP Waigeo Barat (Papua Barat); dan KKPD Raja Ampat (Papua Barat). Keempat lokasi tersebut dikelola oleh dua badan pengelola KKP, yaitu BKKPN Kupang dan BLUD UPTD Raja Ampat. KKP/SAP dan TNP berada di bawah pengelolaan BKKPN Kupang dan KKPD Raja Ampat berada di bawah pengelolaan BLUD UPTD Raja Ampat.



Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Laut Nasional Kepulauan Raja Ampat



Gambar 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Nasional di Waigeo Barat

2.3 Pembiayaan Proyek

Kegiatan COREMAP-CTI didanai oleh Bank Dunia dan Hibah GEF serta dana dukungan dari Pemerintah Indonesia. Hibah GEF dicairkan oleh ICCTF melalui mekanisme sub-hibah kepada LSM dan organisasi lain yang memenuhi syarat mengikuti manual sub-hibah COREMAP-CTI dan Peraturan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3/2020 tentang Panduan umum penyaluran hibah pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. Sub-hibah ditempatkan di bawah kategori 2 dalam anggaran pembiayaan proyek.

Di bawah mekanisme sub-hibah, ICCTF mengembangkan 6 paket kerja berdasarkan indikator tingkat PDO dan indikator menengah, dan memilih penerima hibah melalui seleksi proposal yang mencakup penilaian administratif dan mendalam oleh para ahli independen. Setiap penerima hibah melaksanakan paket pekerjaan

dalam waktu 20 bulan dan pendanaan diberikan berdasarkan mekanisme jangka waktu. Adapun 6 penerima hibah dan besaran dana untuk pelaksanaan paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Kerja 1: Yayasan Terangi (US\$ 1.245.300)
2. Paket Kerja 2: YAPEKA (US\$751.600)
3. Paket Kerja 3: Yayasan Reef Check Indonesia (US\$ 967.000)
4. Paket Kerja 4: PKSPL-IPB (US\$ 869.000)
5. Paket Kerja 5: Yayasan Terangi (US\$ 1.344.300)
6. Paket Kerja 6: PILI (US\$ 598.000)

Akumulatif pengeluaran dan pembiayaan proyek untuk Komponen 3 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kumulatif Pengeluaran dan Pembiayaan Proyek untuk Komponen Proyek 3

PENGELUARAN DAN PEMBIAYAAN PROYEK KUMULATIF PER 30 MEI 2022				
No.	Deskripsi	Threshold (dalam USD)	Kumulatif Aktual (dalam USD)	
1	Pekerjaan, Pelatihan dan Lokakarya, Jasa Konsultan, Barang, Biaya Operasional Tambahan (pro-memoria)	3.803.112,00	3.775.550,75	99%
2	Sub-grants under Part 3 of the Project	5.775.200,00	5.708.751,42	99%
3	Pelatihan dan Lokakarya, Jasa Konsultan, Jasa Non-konsultan, Barang, Biaya Operasional Tambahan di bawah Komponen 3	421.688,00	347.191,41	82%
TOTAL PENGELUARAN		10.000.000,00	9.831.493,58	98%

ICCTF-BAPPENAS hanya bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan kategori 2 dan 3 dari tahun 2019 hingga 2022.

Pelaksanaan COREMAP-CTI dikoordinasikan oleh LIPI sebagai *Project Management Office* (PMO) yang dibentuk di dalam Pusat Penelitian Oseanografi (P2O). Sejak amandemen kedua perjanjian pada tahun 2019, Unit Pelaksana Proyek (UPP) terdiri dari P2O, *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF-BAPPENAS), dan Pusat Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren-BAPPENAS).

ICCTF-BAPPENAS menangani dan mengelola implementasi Komponen 3: Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas. Ada tiga sub komponen yang ditangani ICCTF, yaitu 3.1: Efektivitas

pengelolaan kawasan lindung laut dan konservasi spesies terancam; 3.2: Perencanaan wilayah pesisir terpadu; dan 3.3: Penatagunaan sumber daya pesisir oleh masyarakat. Komponen ketiga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir prioritas di empat wilayah sasaran di Indonesia Timur: TNP Laut Sawu, KKPN/SAP Raja Ampat, KKPN/SAP Waigeo Barat, dan KKPD Raja Ampat. ICCTF bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur skala kecil untuk ekowisata; memperkuat kelompok pengawasan masyarakat untuk melakukan patroli rutin; mengimplementasikan spesies terancam NPOA dan mengimplementasikan rencana aksi ICZM provinsi.



BAB 3.

Capaian Proyek



3.1

PDO 3: Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP)

Setelah restrukturisasi pada tahun 2017, ICCTF-Bappenas ditunjuk untuk mengimplementasikan Komponen 3 program COREMAP-CTI. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir prioritas di empat KKP sasaran, yaitu TNP Laut Sawu, KKPN/SAP Raja Ampat, KKPN/SAP Waigeo Barat, dan KKPD Raja Ampat. Kegiatan dilakukan melalui sub-hibah kepada lembaga-lembaga terpilih. Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan satu pusat penelitian universitas dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu Yayasan Terangi, YAPEKA, Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI), PKSPL-IPB, dan Yayasan PILI. Berikut uraian capaian indikator PDO 4.

Indikator PDO 4: KKP Sasaran dengan Skor Efektivitas Pengelolaan Tingkat Biru Minimal 75%

Indikator PDO nomor 4 mensyaratkan keempat KKP sasaran untuk mencapai efektivitas pengelolaan tingkat biru minimal 75% dengan menggunakan perangkat EKKP3K. Skor tingkat biru mengacu pada kategori EKKP3K yang digunakan oleh KKP untuk menilai efektivitas pengelolaan setiap KKP. Pada tahun 2020,

KKP mengubah alat penilaian dari EKKP3K menjadi EVIKA yang memiliki pendekatan sedikit berbeda untuk menilai efektivitas pengelolaan KKP di Indonesia. EKKP3K menggunakan sistem blok bangunan dengan 5 warna mewakili perbedaan tingkat efektivitas untuk KKP. Sedangkan EVIKA dibangun di atas empat kriteria yang meliputi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta tiga level manajemen, yaitu minimum, optimum, dan berkelanjutan. EVIKA diterapkan pada KKP yang telah ditetapkan, sedangkan EKKP3K dapat diterapkan pada KKP yang belum ditetapkan.

Karena Indikator PDO diminta untuk mencapai level biru 75% di EKKP3K yang tidak berlaku pada periode ini, COREMAP-CTI perlu melakukan sinkronisasi dengan peraturan baru EVIKA. Dengan demikian, proyek ini mengidentifikasi sarana untuk mengubah level EKKP3K menjadi kriteria EVIKA sehingga hasil COREMAP-CTI dapat diidentifikasi dan diakui. Proyek ini memanfaatkan data status EKKP3K yang tersedia pada tahun 2018 dan 2019 sebagai rona awal (*baseline*) dan penilaian

awal untuk EVIKA 2019 dan 2020 berdasarkan presentasi KKP. Perhitungan menggunakan data yang tersedia untuk 6 KKP (4 KKP adalah lokasi proyek WB dan 2 KKP adalah lokasi proyek ADB). Regresi sederhana dilakukan dari data yang tersedia untuk mendapatkan persamaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi skor yang dapat mewakili skor perkiraan untuk EKKP3K.

Dari data yang tersedia dan regresi yang diterapkan, tingkat biru 75% pada EKKP3K teridentifikasi memiliki estimasi skor 44,96% pada EVIKA. Dengan demikian, untuk mengukur pencapaian PDO, skor EVIKA

44,96% digunakan sebagai patokan. Setiap KKP yang dinilai menggunakan EVIKA dan mendapat skor sama dengan 44,96% atau lebih, akan tercatat telah mencapai target indikator 75% level biru. Penilaian tingkat PDO akan menggunakan skor EVIKA dan kategori manajemen dari penilaian terbaru yang diterbitkan oleh KKP.

Pada tahun 2021, KKP melakukan penilaian efektivitas pengelolaan KKP 2020 dan mempublikasikan hasilnya pada Desember 2021. Hasil untuk KKP sasaran COREMAP-CTI sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Efektivitas Pengelolaan KKP Tahun 2020

MPA	EVIKA 2020/2021	PENGLOLAAN
TNP Laut Sawu	54,46%	Optimal
KKPN/SAP Waigeo Sebelah Barat	61,11%	Optimal
KKPN/SAP Raja Ampat	66,26%	Optimal
KKPD Raja Ampat	83,78%	Optimal

Empat KKP menunjukkan skor EVIKA lebih dari 44,96% yang menunjukkan bahwa seluruh KKP telah melampaui level biru 75% pada tahun 2020/2021 dan telah dikelola dengan kategori optimal. Pencapaian ini mungkin tidak terlepas dari proyek, karena pelaksanaan proyek baru dimulai pada Agustus 2020 dan hanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun, hasil tersebut dapat menjadi *baseline* penilaian EVIKA 2021 yang akan dilakukan pada 2022. Merujuk pada rekomendasi yang dibuat untuk perbaikan pengelolaan berdasarkan hasil EVIKA 2020, empat KKP harus membangun infrastruktur yang dapat mendukung pengelolaan KKP dan meningkatkan pemberdayaan serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi. Kegiatan yang direkomendasikan tersebut diselaraskan dengan kegiatan COREMAP-CTI dan dilaksanakan oleh penerima sub-hibah pada tahun 2021. Dengan demikian, dapat diprediksi

bahwa COREMAP-CTI dapat berkontribusi untuk meningkatkan skor EVIKA di empat KKP sasaran.

Status EVIKA 2021 untuk setiap KKP akan dinilai pada tahun 2022 dan hasilnya diperkirakan akan tersedia pada akhir tahun 2022. Sementara itu, proyek COREMAP-CTI akan ditutup pada Juni 2022 dan ada kebutuhan untuk memberikan bukti bahwa hibah dari COREMAP-CTI memiliki kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan empat KKP sasaran. Menanggapi kebutuhan tersebut sambil menunggu hasil penilaian tahun 2021, ICCTF bersama penerima hibah telah mengadakan lokakarya penilaian EVIKA secara mandiri untuk memperkirakan skor EVIKA yang sudah memasukkan keluaran dari kegiatan paket hibah. Hasil penilaian mandiri tersebut diharapkan dapat menjadi acuan antara sebelum hasil penilaian resmi diumumkan oleh KKP pada akhir tahun 2022. Adapun hasil penilaian mandiri EVIKA sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penilaian Mandiri EVIKA Tahun 2021

KKP	EVIKA 2020/2021	Perkiraan EVIKA 2022 (penilaian mandiri)	% Estimasi Peningkatan dari 2021	Pengelolaan
TNP Laut Sawu	54,46%	66,15%	11,69%	Optimal
KKPN/SAP Waigeo Sebelah Barat	61,11%	66,23%	5,12%	Optimal
KKPN/SAP Raja Ampat	66,26%	73,50%	7,24%	Optimal
KKPD Raja Ampat	83,78%	89,76%	5,98%	Berkelanjutan

Hasil menunjukkan bahwa kegiatan hibah COREMAP-CTI dapat berkontribusi pada peningkatan status efektivitas pengelolaan empat KKP sasaran. Peningkatan skor tersebut diidentifikasi dari tiga kriteria yaitu, Masukan (*Input*), Proses, dan Keluaran (*Output*). Kegiatan COREMAP-CTI terutama berkontribusi pada beberapa indikator seperti sumber daya manusia, infrastruktur, pengawasan, pengelolaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pedoman/SOP manajemen, termasuk tingkat kepatuhan, pengetahuan masyarakat, serta data dan informasi. Misalnya, paket hibah mendukung pengembangan SOP perikanan tangkap dan ekowisata berdasarkan analisis daya dukung. SOP ini disediakan untuk digunakan oleh badan pengelola KKP untuk zona pemanfaatan dan melengkapi SOP yang ada. Peningkatan skor antara 5% sampai 11% menunjukkan bahwa intervensi COREMAP-CTI yang terutama diterapkan pada tiga kriteria di atas efektif untuk meningkatkan skor EVIKA. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan KKP lain yang tidak mendapat intervensi dari COREMAP-CTI tetapi mungkin mendapat intervensi dari lembaga lain. Apalagi KKP lain di luar COREMAP-CTI belum melakukan penilaian sendiri dan KKP belum melakukan penilaian resmi pada tahun 2022, oleh karena itu peningkatannya tidak dapat dibandingkan dengan KKP lainnya.

Suatu KKP untuk dikelola secara optimal atau berkelanjutan akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memenuhi semua persyaratan agar dapat dioperasikan secara efektif. Namun, pendanaan juga bisa menjadi masalah dan menghambat pelaksanaan rencana pengelolaan

yang akan mengakibatkan rendahnya penilaian EVIKA. Intervensi yang dilakukan COREMAP-CTI bertujuan untuk mendukung KKP agar dapat mengimplementasikan rencana pengelolaannya dan dikelola secara efektif. Misalnya, anggaran untuk mengelola SAP Waigeo Sebelah Barat dan SAP Raja Ampat dari APBN sebesar Rp 830.404.000,00 untuk tahun 2020–2021 yang mungkin tidak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rencana pengelolaan. Sedangkan kontribusi COREMAP-CTI pada kedua KKP dari hibah paket 1 saja sudah mencapai sebesar Rp 7.090.685.451,00 untuk tahun 2020–2021, yang hampir sembilan kali lipat dari anggaran APBN. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi COREMAP-CTI memiliki *value for money* yang baik dan dapat secara efektif meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP dengan tingkat peningkatan masing-masing 5-7% melalui penerapan beberapa instalasi pengelolaan.

Secara ringkas, indikator PDO 4 peningkatan efektivitas pengelolaan telah dicapai berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2020 dan estimasi penilaian mandiri tahun 2021.

3.1.1 Aset infrastruktur ekowisata kecil, dibangun di kawasan KKP sasaran, sesuai rencana pengelolaan KKP

Target untuk indikator ini adalah 8 infrastruktur ekowisata kecil yang dikembangkan berdasarkan rencana pengelolaan. Sampai dengan Maret 2022, indikator ini telah tercapai dan melampaui target dengan 9 infrastruktur kecil telah selesai dibangun di tiga KKP sasaran sebagai berikut:

Table 4. Ecotourism Infrastructures in Target MPAs

Infrastruktur	Jumlah Unit	Lokasi
Menara pengamatan Cetacea	1	TNP Laut Sawu
Pusat informasi ekowisata	4	TNP Laut Sawu; SAP Raja Ampat; KKPD Raja Ampat
Stasiun Pengamatan Manta	2	SAP Raja Ampat; KKPD Raja Ampat
Jalur pendakian untuk danau ubur-ubur	1	KKPD Raja Ampat
Dermaga terapung	1	SAP Raja Ampat

Tidak ada infrastruktur yang dikembangkan di SAP Waigeo Sebelah Barat karena beberapa masalah terkait dengan alokasi lahan untuk konstruksi. Pada awal pelaksanaan proyek, masyarakat adat yang memiliki tanah telah setuju untuk secara sukarela memberikan izin kepada penerima hibah untuk menggunakan tanah adat mereka untuk pembangunan infrastruktur, yaitu jalur pendakian, dermaga apung, dan pusat informasi. Namun, ketika pembangunan dimulai, beberapa tokoh masyarakat menanyakan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Kondisi tersebut berada di luar kewenangan penerima hibah sebagai mitra pelaksana

COREMAP-CTI. Menyikapi hal tersebut, penerima hibah berkonsultasi dengan ICCTF-BAPPENAS, BKKPN Kupang, BLUD UPTD Raja Ampat, dan pemerintah daerah setempat untuk memindahkan lokasi infrastruktur ke lokasi di bawah pengelolaan BLUD UPTD. Oleh karena itu, hanya SAP Waigeo Sebelah Barat yang tidak memiliki kegiatan konstruksi.

Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan badan pengelola KKP, yaitu BKKPN Kupang dan BLUD UPTD Raja Ampat. Koordinasi dan komunikasi dilakukan untuk menentukan lokasi infrastruktur, pengembangan *Detailed Engineering Design* (DED), interior dan peralatan yang akan disediakan di setiap infrastruktur, serta penerima manfaat yang akan menerima dan mengelola infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun oleh penerima hibah ini telah mengikuti dan menerapkan kerangka kerja perlindungan lingkungan dan sosial seperti yang disyaratkan oleh Bank Dunia. Kajian dampak lingkungan dan sosial telah dilakukan sebelum konstruksi sebagai prasyarat izin lingkungan. Sebagian besar infrastruktur membutuhkan SPPL sebagai izin lingkungannya, namun jalur pendakian di Misool membutuhkan UKL/UPL karena lokasi danau ubur-ubur, yang dikategorikan sebagai hutan suaka di bawah pengelolaan BKSDA. Selama konstruksi semua pekerja menerapkan prosedur keselamatan, seperti menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti rencana HSE untuk situasi darurat.

Mengenai kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana pengelolaan KKP dapat dilihat dari letak infrastruktur yang selaras dengan peruntukan zonasi. Misalnya, menara pengamatan Cetacea terletak di sub-zona konservasi Cetacea. Hal ini akan mendukung terwujudnya pemanfaatan Cetacea dan habitatnya secara berkelanjutan. Contoh lainnya adalah stasiun penampakan manta yang terletak di zona pemanfaatan baik di KKP SAP Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat dan akan mendukung pembentukan program ekowisata.

Semua prasarana akan dikelola dan digunakan oleh kelompok masyarakat di bawah pengawasan kepala desa, atau badan pengelola KKP, dan/ atau dinas perikanan. Berita Acara Serah Terima – BAST akan ditandatangani oleh ICCTF-BAPPENAS dengan penerima manfaat di akhir proyek. Namun, infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena kontraktor telah menyelesaikan pembangunan, dan penerima hibah telah menandatangani Berita Acara Penitipan-BAP dengan kelompok masyarakat atau kantor setempat sebagai penerima manfaat. Setiap infrastruktur dilengkapi dengan manual pemanfaatan dan pemeliharaan dan telah dibagikan dengan kelompok masyarakat. Sebagai sarana verifikasi dokumen, masing-masing infrastruktur memiliki laporan penyelesaian teknis.

Berikut ini adalah penerima manfaat yang mengelola dan memanfaatkan infrastruktur dan gambar infrastruktur:

Tabel 5. Penerima Manfaat Kegiatan Infrastruktur

Infrastruktur	Lokasi	Penerima Manfaat
Menara pengamatan Cetacea	Kampung Naikean, Kecamatan Kupang	Pokdarwis Karsiba (kelompok sadar wisata)
Pusat informasi ekowisata - Oesina	Kampung Lifuleo, Kupang District	BUMDes Damai Lifuleo, unit usaha pariwisata
Pusat informasi ekowisata - Mebba	Tulaika, Kampung Mebba, Kecamatan Sabu Rajjua	Pokdarwis Mata Pado Mara
Pusat informasi ekowisata – Meosarar kecil	Kampung Meosarar Kecil, Kecamatan Raja Ampat	Pokmaswas Masa Dimawa
Pusat informasi ekowisata – Yellu	Kampung Yellu, Misool, Kecamatan Raja Ampat	Kampung Yellu
Stasiun Pengamatan Manta – Yef Nabi Kecil	Pulau Yef Nabi Kecil, Kecamatan Raja Ampat	Pokmaswas Masa Dimawa
Stasiun Pengamatan Manta – Dayan	Pulau Dayan, Kecamatan Raja Ampat	BLUD UPTD Raja Ampat
Jalur pendakian untuk Danau Ubur-ubur	Kampung Tomolol, Kecamatan Raja Ampat	Pokmaswas Aine Ama
Dermaga terapung	Kampung Meosarar Kecil, Kecamatan Raja Ampat	Pokmaswas Masa Dimawa

Gambar 5. Infrastruktur yang dibangun oleh penerima hibah. Kiri atas dan kanan: Pusat informasi di Oesina, Kupang; Kanan bawah: Pusat informasi di Yelu, Misool; Kanan bawah: Pusat informasi di Meosasar Kecil



Gambar 6. Infrastruktur yang dibangun oleh penerima hibah. Sisi kiri: menara pengamatan Cetacea, Naikean; Kanan atas: Stasiun Pengamatan Manta, Meosasar; Kanan bawah: Jalur pendakian ke danau ubur-ubur, Misool



3.1.2 Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang melakukan pengawasan rutin di wilayah KKP sasaran

Target indikator 3.2 adalah 18 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan melakukan patroli rutin di KKP sasaran. Bukti dari indikator ini adalah surat keputusan dari kepala dinas kelautan dan perikanan di tingkat provinsi, serta *logbook* dan laporan pengawasan. Selama periode 2020 hingga 2021, 23 kelompok pengawasan masyarakat/ Pokmaswas telah terdaftar di kantor provinsi dan memperoleh SK, sementara 1 kelompok sedang menunggu surat keputusan untuk diselesaikan. Sementara itu, hanya 22 kelompok masyarakat

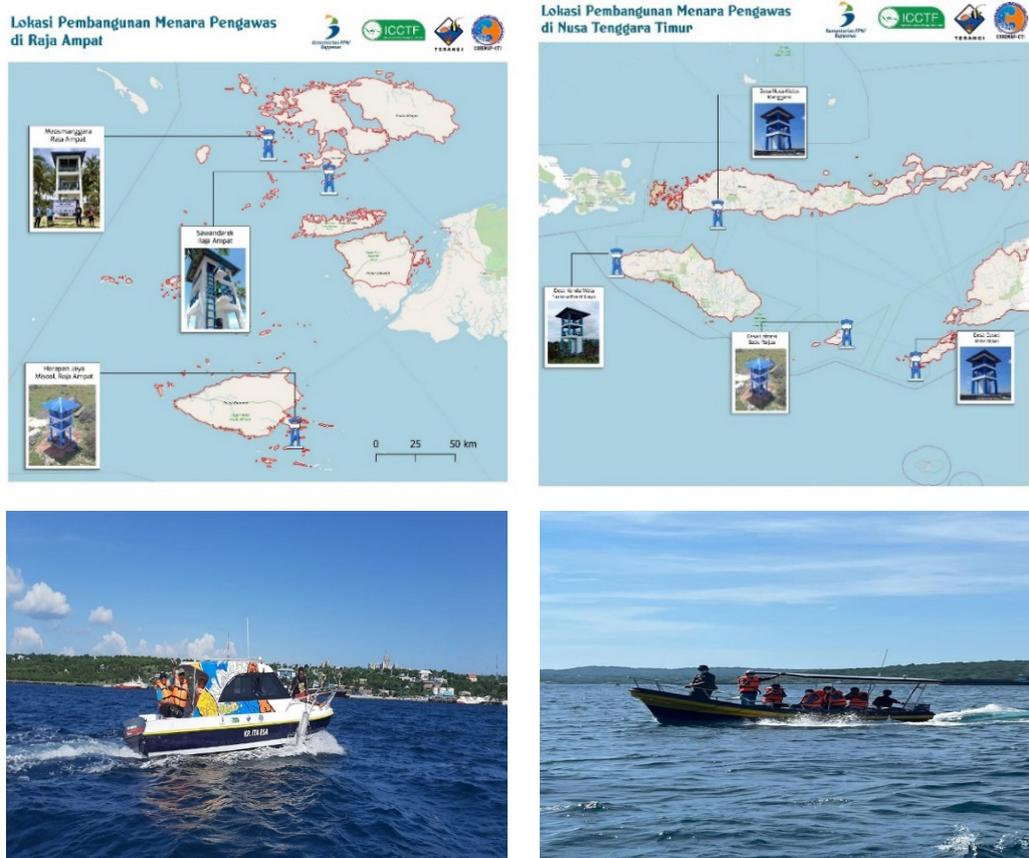
yang melakukan patroli rutin di wilayah kerjanya sesuai kesepakatan, dan 2 kelompok lainnya tidak pernah memberikan laporan kegiatan patroli yang mengindikasikan kedua kelompok tersebut tidak melakukan patroli rutin. Daftar kelompok pengawas berbasis masyarakat disajikan pada Lampiran 7. Pokmaswas juga mendapatkan pelatihan tiga tingkat terkait pengawasan dasar, pengawasan lanjutan, dan pengawasan udara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan patroli rutin dan terlibat dalam kegiatan konservasi.

Pencapaian ini tidak terlepas dari proyek tersebut, karena semua Pokmaswas telah diidentifikasi dan dibantu oleh penerima hibah untuk mendapatkan surat keputusan dari kantor provinsi dan

meningkatkan kapasitas mereka dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat. Perwakilan dari masing-masing kelompok pengawas dilatih untuk tiga topik pengawasan berbasis masyarakat, yaitu pengawasan dasar, pengawasan lanjutan, dan pengawasan udara. Untuk memperkuat kelompok masyarakat pengawas untuk melakukan patroli rutin, paket hibah juga menyediakan fasilitas dan peralatan untuk mendukung kegiatan kelompok. Fasilitas tersebut antara lain menara pengawas, kapal patroli, dan peralatan pengawasan. Selama pelaksanaan proyek, penerima hibah juga mendukung biaya

operasional untuk melakukan patroli rutin dengan mekanisme penggantian yang akan diberikan setelah kelompok menyerahkan laporan kegiatan pengawasan mereka.

Empat menara pengawas dibangun di TNP Laut Sawu, 2 menara dibangun di KKPD Raja Ampat, dan 1 menara dibangun di SAP Raja Ampat. Sembilan kapal pengintai disebar ke Pokmaswas di TNP Laut Sawu, SAP Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat. Sedangkan 24 peralatan dibagikan kepada 24 Pokmaswas untuk menunjang kegiatan mereka. Lokasi menara pengawas dan foto kapal pengawas ada di bawah ini:

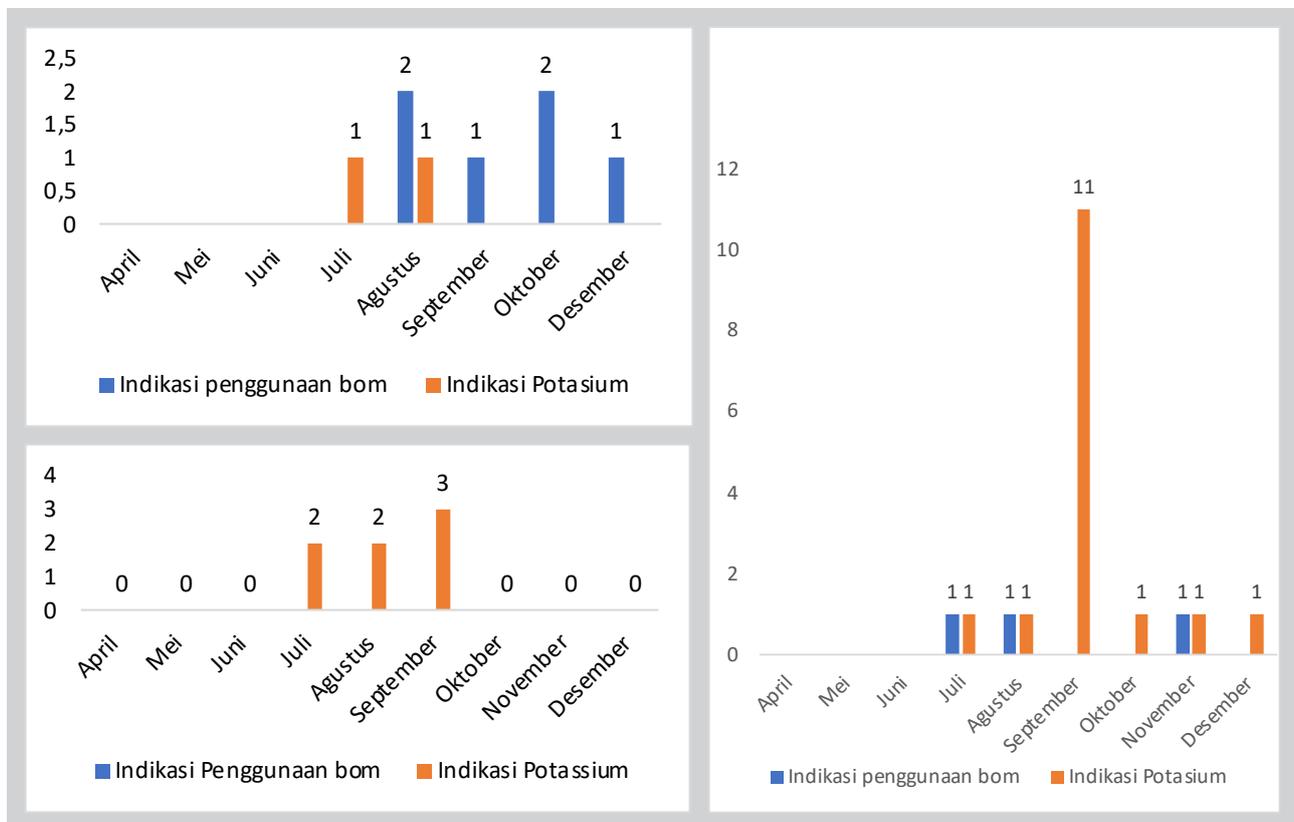
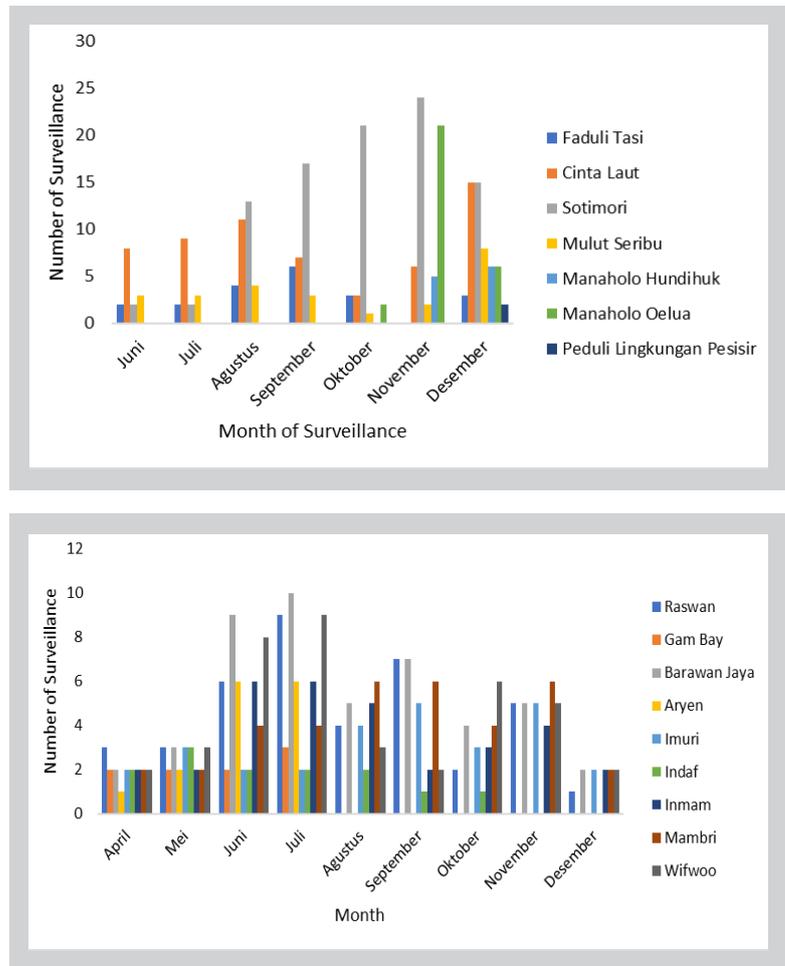


Gambar 7. Lokasi menara pengintai dan gambar kapal pengintai

Berdasarkan laporan pengawasan dari Pokmaswas di Raja Ampat dan Rote Ndao, rata-rata kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pokmaswas tiga kali seminggu untuk setiap kelompok dengan total aktivitas masing-masing 260 dan 239 pengawasan (Gambar 34). Sedangkan untuk Pokmaswas di Manggarai, Sabu Raijua, dan Sumba, jumlah kegiatan pengawasan masing-masing adalah 49, 96, dan 84. Dari kegiatan tersebut, beberapa temuan dicatat dan dilaporkan, misalnya selama patroli rutin di Manggarai, Sumba Barat Daya, dan Rote, ditemukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, seperti

penangkapan ikan dengan bahan peledak dan penangkapan ikan dengan racun. Frekuensi temuan penangkapan ikan yang merusak adalah 7 di Manggarai, 8 di Rote Ndao, dan 19 di Sumba Barat Daya (Gambar 35). Tindakan yang dilakukan untuk kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah melapor ke kepala desa, dan polisi atau PSDKP. Pokmaswas berperan untuk mendengar, mengamati, dan melaporkan semua kegiatan yang ditemukan selama kegiatan pengawasan. Pokmaswas tidak berhak menangkap atau menyelidiki temuan mereka.

Gambar 8. Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas. Atas: Kegiatan pengawasan di Raja Ampat; Bawah: Kegiatan pengawasan di Rote Ndao



Gambar 9. Frekuensi ditemukannya penangkapan ikan destruktif saat patroli pengawasan Pokmaswas di tiga kecamatan di TNP Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Kiri atas: Kabupaten Rote Ndao; Kiri bawah: Kabupaten Manggarai; Kanan: Sumba Barat Daya

Terkait dengan temuan penangkapan ikan yang merusak, tidak ada data pembandingan yang dapat digunakan untuk menjelaskan seberapa efektif intervensi Pokmaswas dalam mengurangi penangkapan ikan yang merusak. Penyebabnya karena tidak ada rekaman data yang diperoleh dari pemangku kepentingan terkait sebelum periode intervensi yang dikumpulkan dari lokasi yang sama dengan wilayah pengawasan Pokmaswas. Data yang tersedia, jika ada, mungkin tidak dapat dibandingkan karena berasal dari lokasi yang berbeda. Namun dapat dijelaskan bahwa adanya patroli rutin yang dilakukan oleh Pokmaswas, maka data terkait penangkapan ikan yang merusak di suatu wilayah telah tersedia dan dapat digunakan sebagai rona awal untuk mengevaluasi dampak keberadaan Pokmaswas di wilayah tersebut ke depan. Jika kita merujuk pada informasi anekdot, aktivitas

penangkapan ikan yang merusak berkurang setelah Pokmaswas aktif melakukan pengawasan. Orang-orang yang akan mencoba melakukan penangkapan ikan yang merusak akan menghindari daerah tempat Pokmaswas berada.

3.1.3 Kegiatan rencana aksi ICZM provinsi dilaksanakan di kawasan KKP sasaran

Indikator hasil ini memiliki target untuk mengimplementasikan 14 kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi ICZM Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan oleh 5 penerima hibah di Raja Ampat tercatat sebagai pencapaian indikator ini. Hingga Maret 2022, indikator ini telah tercapai dengan 17 kegiatan yang dilaksanakan. Daftar kegiatan yang sejalan dengan rencana aksi ICZM Papua Barat disajikan pada tabel di bawah ini.

Table 6. Activities Aligned with ICZM Action Plan for West Papua

Rencana Aksi ICZM/RZWP3K		Kegiatan COREMAP-CTI WB		Status
No	Aktivitas	Paket Kegiatan	Keluaran	
Masyarakat Hukum Adat (MHA)				
1	Meningkatkan kapasitas MHA untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan	GP 6	Meningkatkan kapasitas KMHA dalam implementasi tata kelola perikanan karang dengan prinsip RBSFM dan pengembangan usaha	Pelatihan RBSFM untuk MHA Selesai
2	Memfasilitasi pengakuan terhadap MHA yang ada dan terkait dengan pesisir dan laut di Papua Barat	GP 6	POKJA KMHA untuk pengakuan dan perlindungan sistem tenurial KMHA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SK Pokja KMHA Mekanisme Kerja Tersedia
3	Pengembangan regulasi pemanfaatan sumber daya alam di lokasi MHA	GP 6	Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak	Paket RBSFM untuk MHA tersedia
ZONA PARIWISATA				
4	Meningkatkan daya tarik dan destinasi pariwisata	GP 3	Usaha pariwisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan (dan industri pendukungnya) di setidaknya 3 lokasi terpilih di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok wisata spesies berbasis masyarakat dibentuk dan paket wisata dengan atraksi dan destinasi telah tersedia dan telah diujicobakan. Penilaian pendirian pariwisata berbasis spesies selesai

5	Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas ekowisata	GP 1	Pembangunan stasiun Pengamatan Manta	Selesai
		Pengembangan jalur pendakian	Selesai	
		Pembangunan dermaga terapung	Selesai	
		Pusat ekowisata dan informasi dengan pengembangan panel surya	Selesai	
6	Pengembangan kode etik untuk interaksi/pariwisata spesies karismatik	GP 3	Kode Etik Wisata Hiu, Manta, dan Cetacea Berkelanjutan Berdasarkan Studi Literatur Kode Etik Berbasis Ilmiah	Kode etik tersedia untuk Pari Manta, Hiu, dan Cetacea
ZONA PERIKANAN TANGKAP				
7	Menerapkan teknologi rantai dingin pascapanen untuk meningkatkan kualitas produk perikanan	GP 1	Pengembangan PV untuk <i>cold storage</i> bergerak	<i>Cold storage</i> bergerak dengan solar pv tersedia
ZONA BUDIDAYA PERIKANAN				
8	Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas budidaya	GP 1	Dukungan untuk pengembangan budidaya di KKPD Selat Dampier	Keramba Jaring Apung-KJA Perikanan selesai dibangun
ZONA HUTAN MANGROVE				
9	Penelitian dan Pengembangan	GP 4	Rehabilitasi ekosistem pesisir	Laporan studi untuk habitat kritis tersedia
10	Rehabilitasi ekosistem mangrove	GP 4	Rehabilitasi ekosistem pesisir	Rehabilitasi mangrove telah selesai dan sepenuhnya berjalan dengan dukungan dari masyarakat
11	Meningkatkan kapasitas staf badan pengelola KKP	GP 4	Platform <i>integrated coastal zone management</i> (ICZM) yang memuat aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Lokakarya platform tata kelola ICZM dilakukan dan dihadiri oleh staf BLUD UPTD Raja Ampat (selesai)
			Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu di bidang penataan ruang laut, pariwisata, perikanan, dan/atau konservasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan ICZM untuk staf/pemangku kepentingan lokal telah selesai • Pelatihan GIS selesai
		GP 1	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam rehabilitasi ekosistem pesisir	Lokakarya rehabilitasi ekosistem pesisir selesai
		GP 3	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam melakukan studi populasi dan konservasi hiu, pari manta, dan Cetacea	Lokakarya selesai
		GP 5	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan staf lokal dalam sertifikasi selam	Pelatihan menyelam selesai
12	Pengembangan regulasi dan SOP pengelolaan KKP di lokasi KKP	GP 4	Rencana teknis (SOP) pemanfaatan berdasarkan daya dukung di KKP	SOP berdasarkan daya dukung yang tersedia

13	Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan KKP	GP 5	Menara pengawasan	Selesai
			Peralatan operasional pengawasan untuk POKMASWAS	Selesai
			Perahu pengawasan untuk POKMASWAS	Selesai
14	Monitoring dan evaluasi	GP 4	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP3K	Sistem pemantauan sepenuhnya berjalan
15	Rehabilitasi habitat dan populasi ikan	GP 4	Rehabilitasi ekosistem pesisir	Rehabilitasi Lamun, Terumbu Karang dan Mangrove sedang berlangsung
16	Pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi laut	GP 5	Meningkatkan kapasitas POKMASWAS dalam pengawasan dan pengelolaan KKP di Laut Sawu dan Raja Ampat	Pelatihan selesai
			Dukung operasi mingguan POKMASWAS	Dukungan operasional sepenuhnya berlangsung – hingga Maret 2021
17	Sosialisasi, penyadaran dan edukasi kawasan konservasi laut	GP 4	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan penyadaran, publikasi dan komunikasi pelaksanaan proyek	Kampanye dan sosialisasi selesai
		GP 3	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam konservasi hiu, pari manta, dan Cetacea	Sosialisasi konservasi pari manta, hiu, dan Cetacea selesai

Seluruh kegiatan dilakukan di Raja Ampat yang menjadi salah satu target lokasi dalam rencana aksi RZWP3K. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi berbasis web untuk RZWP3K yang dikembangkan oleh PKSPL-IPB sebagai penerima hibah untuk mendukung pemerintah Papua Barat memantau pelaksanaan RZWP3K dan kepatuhan terhadap alokasi spasial.

3.1.4 Jumlah tujuan pengelolaan dari Rencana Aksi Nasional KKP yang telah dilaksanakan untuk Hiu, Cetacea, dan Pari Manta di wilayah KKP sasaran

Implementasi indikator 3.4 dilakukan oleh penerima hibah dari Yayasan Reef Check Indonesia. Dari kegiatan paket hibah ini juga menghasilkan ringkasan kebijakan (*policy brief*) terkait tata ruang laut yang digunakan untuk Cetacea; kode etik untuk Cetacea, kode etik untuk hiu dan pari manta, dinamika populasi hiu dan pari untuk pengelolaan perikanan dan tata ruang laut yang digunakan pari manta. Ringkasan kebijakan ini telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan utama untuk diadopsi dalam rencana pengelolaan KKP.

Ada satu metode inovatif yang telah diterapkan untuk mempelajari pola pergerakan cetacea dan proyek

ini menjadi yang pertama menggunakan metode ini di Indonesia. Penggunaan penanda satelit untuk melacak pola pergerakan paus telah berkontribusi dalam memahami koridor yang digunakan paus untuk bermigrasi dari Australia Selatan ke Indonesia Timur. Temuan ini akan berguna untuk merancang rencana pengelolaan dan zonasi KKP.

Untuk indikator 3.4, target dilaksanakan 9 kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu dan Pari, Pari Manta, dan Cetacea. Selama 20 bulan pelaksanaan, penerima hibah telah mampu melaksanakan 21 kegiatan yang terdaftar di tiga RAN (Cetacea: 8 Kegiatan; Manta: 8 kegiatan, dan Hiu: 5 kegiatan), dan memperoleh dukungan dari KKP berdasarkan pemantauan RAN mereka. Seluruh kegiatan dilakukan di kedua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Kegiatan yang Dilaksanakan untuk RAN Cetacea

No	RAN CETACEA			Kegiatan COREMAP-CTI WB	STATUS
	No	Strategi	Kegiatan	Keluaran	
1	1.1	Penguatan kapasitas penelitian dan meningkatkan aktivitas penelitian terkait Cetacea	Melakukan survei dan pemantauan sebaran penampakan, ancaman, jalur migrasi dan sebaran habitat penting Cetacea	Kajian Kelimpahan Relatif dan Kesesuaian Habitat Cetacea di Laut Sawu	Survey selesai dan hasil studi tersedia termasuk peta sebaran cetacea di TNP Laut Sawu
				Kajian pola pergerakan Cetacea di TNP Laut Sawu untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan KKP	Penandaan selesai dan hasil studi tersedia termasuk peta migrasi dari penandaan satelit
				Studi hotspot Cetacea terdampar di Indonesia untuk lebih memahami hubungan antara kejadian terdampar dan variabel seperti faktor oseanografi dan aktivitas manusia seperti perikanan, alur laut atau minyak dan gas, terutama di Laut Sawu dan TNP Raja Ampat.	Peta Hotspot dan Analisis Hasil tersedia
2			Melakukan peningkatan kapasitas bagi peneliti	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam melakukan studi populasi dan konservasi hiu, pari manta, dan Cetacea	Peningkatan kapasitas telah dilakukan dengan 1 peneliti dari universitas, dan 2 Staf dari BKKPN Kupang menghadiri peningkatan kapasitas
3	4.1	Penetapan habitat penting Cetacea sebagai kawasan lindung laut	Melakukan penilaian pada habitat penting termasuk koridor Cetacea	Kajian Kelimpahan Relatif dan Kesesuaian Habitat Cetacea di Laut Sawu	Hasil studi tersedia dengan peta distribusi
4			Melakukan pemetaan pada habitat penting termasuk koridor migrasi Cetacea	Kajian pola pergerakan Cetacea di TNP Laut Sawu untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan KKP	Hasil studi yang tersedia termasuk peta migrasi
5	5.1	Pengembangan ekowisata Cetacea	Pembentukan kegiatan percontohan untuk ekowisata cetacea	Usaha pariwisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan (dan industri pendukungnya) di setidaknya 3 lokasi terpilih di TNP Raja Ampat dan Laut Sawu	<ul style="list-style-type: none"> Kajian tentang pendirian wisata berbasis spesies tersedia. Kelompok masyarakat untuk melaksanakan wisata berbasis spesies didirikan Paket wisata menonton lumba-lumba dikembangkan dan telah diujicobakan
6			Melakukan pelatihan teknis pelaksanaan ekowisata cetacea	Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata untuk mewujudkan pariwisata berbasis spesies yang berkelanjutan	Pelatihan untuk kelompok masyarakat selesai

No	RAN CETACEA			Kegiatan COREMAP-CTI WB		STATUS
	No	Strategi	Kegiatan	Keluaran		
7	6.1	Memperkuat dan meningkatkan kapasitas jaringan mamalia laut yang terdampar	Melakukan pelatihan teknis tentang cara penanganan mamalia laut yang terdampar	Modul dan pelatihan penanganan mamalia laut yang terdampar dan modul tersebut digunakan sebagai materi pelatihan bagi pemangku kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan mamalia laut terdampar untuk dokter hewan • Pelatihan mamalia laut terdampar untuk pemangku kepentingan
8	7.1	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangani mamalia laut yang terdampar	Menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan untuk pelatih pelatihan mamalia laut terdampar	Modul dan pelatihan penanganan mamalia laut yang terdampar dan modul tersebut digunakan sebagai materi pelatihan bagi pemangku kepentingan		Modul penanganan mamalia laut yang terdampar telah tersedia dan telah digunakan selama pelatihan pemangku kepentingan

Tabel 8. Kegiatan yang dilaksanakan untuk RAN Pari Manta

No	RAN PARI MANTA			Kegiatan COREMAP-CTI WB		STATUS
	No	Strategi	Kegiatan	Indikator	Keluaran	
1	1.1	Memperkuat kegiatan survei populasi, pemantauan dan pendataan migrasi pari manta	Survei dasar dan pemantauan status populasi pari manta di empat lokasi	Data dasar dan status populasi deret waktu tersedia	Kajian pola pergerakan dan sensus populasi pari manta di Raja Ampat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP	Hasil penilaian sensus penduduk menggunakan PhotoID tersedia
2			Penandaan manta di empat lokasi	Tersedia data pola migrasi pari manta	Kajian pola pergerakan dan sensus populasi pari manta di Raja Ampat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP	Hasil penilaian tersedia dan sepenuhnya berjalan untuk pengumpulan data penandaan akustik untuk pola pergerakan saat penandaan satelit selesai
3	3.1	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konservasi pari manta	Menyiapkan dan menyebarkan materi sosialisasi	Materi sosialisasi tersedia dan didistribusikan ke lokasi yang berindikasi kekerasan	Strategi dan produk komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan tentang pengelolaan hiu, manta, dan cetacea	Poster dan lembar fakta tentang konservasi Pari Manta tersedia
4			Melakukan sosialisasi peraturan perlindungan pari manta kepada nelayan dan pedagang.	Pengetahuan pemangku kepentingan tentang regulasi pari manta meningkat	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam konservasi hiu dan pari, manta dan cetacea	Sosialisasi konservasi Manta, Hiu dan Cetacea dilakukan

No	RAN PARI MANTA			Kegiatan COREMAP-CTI WB		STATUS
	No	Strategi	Kegiatan	Indikator	Keluaran	
5	4.1	Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam wisata manta	Mengembangkan penilaian model wisata manta berbasis masyarakat	Model ekowisata yang akan diterapkan tersedia	Usaha pariwisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan (dan industri pendukungnya) di setidaknya 3 lokasi terpilih di TNP Raja Ampat dan Laut Sawu	<ul style="list-style-type: none"> Kajian tentang pendirian wisata berbasis spesies tersedia. Kelompok masyarakat untuk melaksanakan wisata berbasis spesies didirikan
6			Pengembangan pedoman ekowisata manta	Bimbingan teknis ekowisata manta	Kode Etik Wisata Hiu, Manta, dan Cetacea Berkelanjutan Berdasarkan Studi Literatur Kode Etik Berbasis Ilmiah	Kode etik tersedia
7			Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pada ekowisata manta	Kapasitas kelompok masyarakat meningkat	Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata untuk mewujudkan pariwisata berbasis spesies yang berkelanjutan	Pelatihan untuk kelompok masyarakat telah dilakukan
8			Menyiapkan sarana, prasarana dan bantuan kepada kelompok masyarakat	Peralatan, prasarana dan pendampingan ekowisata manta yang dilaksanakan	Usaha pariwisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan (dan industri pendukungnya) di setidaknya 3 lokasi terpilih di TNP Raja Ampat dan Laut Sawu	<p>Equipment for community group provided</p> <p>Community group piloting tourism package</p>

Tabel 9. Kegiatan yang dilaksanakan untuk RAN Hiu

NO	RAN Hiu				Kegiatan COREMAP-CTI WB	STATUS
	No	Strategi	Kegiatan	Indikator	Keluaran	
1	3.2	Optimalisasi data produksi perikanan hiu dan pari di lokasi pendaratan primer	Melakukan pencatatan penangkapan ikan hiu dan pari yang mencakup genus/ spesies di lokasi pendaratan utama	Laporan perekaman data	Kajian dinamika populasi Elasmobranch berdasarkan data perikanan di Papua Barat	Data bulanan yang tercatat di lokasi pendaratan tersedia
2	4.2	Penguatan penelitian aspek pengelolaan perikanan	Kajian alat tangkap berkelanjutan/alat tangkap ramah lingkungan	Laporan penilaian	Penilaian efektivitas lampu LED sebagai alat mitigasi tangkapan sampingan elasmobranch di Laut Sawu	Penilaian laporan tersedia
3	1.2	Penyusunan regulasi pendukung pengelolaan perikanan hiu dan pari secara berkelanjutan	Melakukan FGD, konsultasi publik, dan workshop pengelolaan hiu dan pari	Laporan dan rekomendasi pengelolaan perikanan hiu dan pari	Rekomendasi Kebijakan Nasional berdasarkan masukan dari pertemuan dan hasil kegiatan dalam Paket 3 ICCTF	Ringkasan kebijakan tentang dinamika populasi tersedia
4	7.1	Meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan dan konservasi	Persiapan publikasi dan materi sosialisasi	Publikasi cetak dan materi sosialisasi	Strategi dan produk komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan tentang pengelolaan hiu, manta, dan Cetacea	Komunikasi strategis dan produk komunikasi tersedia
5			Pelaksanaan sosialisasi	Laporan sosialisasi	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam konservasi hiu dan pari, manta dan Cetacea	Sosialisasi konservasi manta, hiu dan Cetacea dilakukan

3.2 Hasil-hasil Antara Proyek

Tabel 10. Kerangka Hasil Program COREMAP-CTI 2022

No.	Indikator PDO	Satuan	2022		
			Target	Tercapai	%
Indikator Hasil Antara Komponen 3: Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas					
3.1	Aset infrastruktur ekowisata kecil, dibangun di kawasan KKP sasaran, sesuai rencana pengelolaan KKP	Infrastruktur	8	9	113
3.2	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) terdaftar yang melakukan patroli pengawasan secara berkala di kawasan KKP sasaran	Pokmaswas	18	22	122
3.3	Kegiatan rencana aksi ICZM provinsi dilaksanakan di dalam dan sekitar kawasan KKP sasaran	Kegiatan	14	17	121
3.4	Jumlah kegiatan pengelolaan dari Rencana Aksi Nasional KKP yang telah dilaksanakan untuk Hiu, Cetacea, dan Pari Manta di kawasan KKP sasaran	Kegiatan	9	21	233



Bab 4.

Pelajaran Yang Didapat



4.1

Manajemen Proyek

Tujuan Komponen 4 (Manajemen Proyek) adalah untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan proyek, yang terdiri dari: (1) pemantauan dan evaluasi kinerja proyek; (2) memantau kepatuhan terhadap pengamanan dan pengelolaan fidusia; dan (3) koordinasi dengan mitra.

Pada tahun 2020, merebaknya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pelaksanaan program, terutama program-program yang memerlukan kegiatan lapangan, survei dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara beberapa aktivitas dapat dialihkan ke alternatif virtual, yang lain harus ditunda untuk mengurangi risiko infeksi. Namun, ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, seperti pembangunan infrastruktur COREMAP-CTI. Untuk mengurangi risiko infeksi, tim harus mengikuti rencana mitigasi dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Membentuk gugus tugas internal di lokasi proyek konstruksi.
- Mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi proyek konstruksi.
- Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi proyek pembangunan.
- Menerapkan langkah-langkah mitigasi di lokasi proyek konstruksi.

Situasi COVID-19 di Indonesia banyak membaik di tahun 2021, yang kemudian memungkinkan tim untuk melakukan kegiatan program yang tersisa. Kegiatan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dan tindakan pencegahan keamanan.

Dengan penyelesaian proyek pada Juni 2022, PDO 4 tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir proyeknya, yaitu 75% level biru atau minimal 44,96% dengan EVIKA. Estimasi skor EVIKA untuk tahun 2022 saat ini menggambarkan penilaian sendiri oleh ICCTF bersama dengan KKP dan tim manajemen

KKL untuk melaporkan proyek karena skor penilaian resmi dari KKP untuk tahun 2022 baru akan dirilis pada bulan Desember 2022.

Kriteria berikut digunakan untuk peningkatan penilaian mandiri efektivitas KKP dengan metrik EVIKA: (i) masukan, seperti indikator sumber daya manusia dan infrastruktur, (ii) proses, seperti pengawasan, pengelolaan infrastruktur dan indikator pemberdayaan masyarakat, (iii) keluaran, seperti tingkat kepatuhan, pengetahuan masyarakat, data dan informasi. Berdasarkan skor EVIKA tahun 2020/2021 keempat KKP mendapat skor antara 54,46–83,78%. Estimasi hasil penilaian mandiri EVIKA untuk tahun 2022 sejauh ini adalah antara 66,15–89,76% untuk keempat KKP. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan adalah “Berkelanjutan” untuk KKPD Raja Ampat dan “Optimal” untuk tiga KKP lainnya. Indikator hasil antara berada di jalur yang tepat untuk memenuhi sebagian besar target akhir Proyek (lebih detail pada bagian berikutnya).

Dalam konteks implementasi hibah, mekanisme pendanaan saat ini melalui hibah kepada LSM dan organisasi lain yang memenuhi syarat yang dipilih menggunakan mekanisme seleksi merupakan komponen utama keberhasilan implementasi. Mekanisme hibah memungkinkan pelaksanaan di tingkat akar rumput atau masyarakat dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proyek. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dalam proses administrasi, di antaranya adalah pencairan anggaran ke LSM karena keterlambatan persetujuan DIPA yang memengaruhi kegiatan di lapangan. Beberapa kegiatan tertunda dan harus dijadwalkan ulang karena ketersediaan dana. Selain itu, ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia penerima hibah juga menjadi tantangan lain. Mekanisme pelaporan pembiayaan yang sesuai dengan mekanisme APBN juga memperlambat proses di awal pelaksanaan, namun seiring

berjalannya waktu mulai ada. Tim manajemen Unit Pelaksana Proyek (UPP) harus memberikan bantuan dan pemantauan tertutup terhadap kegiatan penerima hibah untuk memastikan semua selaras dengan rencana kerja dan bertujuan untuk mencapai indikator target.

Dalam konteks implementasi hibah, mekanisme pendanaan saat ini melalui subgrant kepada NGO dan organisasi lain yang memenuhi syarat yang dipilih menggunakan mekanisme *call for proposal* merupakan komponen utama dari keberhasilan implementasi. Mekanisme subgrant memungkinkan implementasi di tingkat dasar atau masyarakat dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proyek. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak tantangan dalam proses administrasi, termasuk pencairan anggaran ke NGO akibat keterlambatan pengesahan DIPA yang mempengaruhi kegiatan di lapangan. Beberapa kegiatan tertunda dan harus dijadwalkan ulang karena ketersediaan dana. Selain itu, ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia penerima hibah juga menjadi tantangan lain.

Mekanisme pelaporan pembiayaan yang sesuai dengan mekanisme APBN juga memperlambat proses di awal pelaksanaan, namun seiring berjalannya waktu mulai ada. Tim manajemen PIU harus memberikan pendampingan dan pemantauan tertutup terhadap kegiatan penerima hibah untuk memastikan semuanya selaras dengan rencana kerja dan ditujukan untuk mencapai indikator target.

Mengenai efektivitas dari implementasi COREMAP-CTI PDO 3, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat secara efektif meningkatkan skor EVIKA jika selaras dengan rencana pengelolaan dan fokus pada kriteria proses yang menjadi tanggung jawab badan pengelola. Sementara itu, alokasi anggaran untuk proyek harus mencerminkan dukungan kepada KKP dengan dana minimum untuk melaksanakan rencana pengelolaan agar memiliki nilai uang yang baik.

4.2

Hasil dan Dampak dari Proyek

Misi mencatat bahwa proyek telah membuat kemajuan yang baik untuk mencapai, dan dalam beberapa kasus melebihi, tujuan yang ditargetkan, dengan pelaksanaan dan pencairan berjalan dengan baik sebesar US\$9,98 juta atau 99% di bawah Hibah.

Selama kegiatan COREMAP-CTI, telah terjadi beberapa dampak signifikan terhadap pengelolaan

wilayah pesisir dan laut Indonesia. Dampak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melakukan kegiatan yang sama atau serupa di masa yang akan datang. Uraian dampak yang disajikan dalam bab ini terbatas pada kegiatan COREMAP-CTI (2017–2022), meskipun dalam praktiknya telah terjadi penyesuaian akibat perubahan lembaga pelaksana.

4.3

Keberlanjutan Proyek dan Strategi Penyelesaian

Karena Proyek COREMAP-CTI telah selesai pada Juni tahun 2022, perlu untuk menentukan strategi pasca penyelesaian. Strategi telah disusun untuk mengakomodasi semua kegiatan terkait yang harus dilaksanakan meskipun proyek telah dihentikan.

Dalam konteks pelaksanaan hibah, beberapa pembelajaran telah diperoleh dari penerima hibah dan masyarakat dan berdasarkan pembelajaran ini, ICCTF Bappenas mengembangkan strategi keluar untuk memastikan keberlanjutan kegiatan, sebagai berikut:

1. Manajemen Aset Sarana dan Prasarana

- Mengintegrasikan kelompok-kelompok yang ada (POKDARWIS, POKMASWAS, dan KUB) ke dalam BUMDes untuk menjamin keberlangsungan kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam rencana kerja desa dan mengalokasikan dana untuk kegiatan pengawasan. Mekanisme ini harus didiskusikan dan disetujui oleh penduduk desa.
- Mengintegrasikan Kegiatan COREMAP-CTI dengan Kegiatan di K/L untuk dapat memperoleh hibah dari K/L atau bantuan pendanaan.
- Mendorong akses pendanaan melalui alokasi khusus untuk sarana prasarana lain yang masih diperlukan serta anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Menghubungkan kelompok dengan sektor swasta untuk mengakses CSR untuk dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan mata pencaharian.

- Meningkatkan kapasitas kelompok dalam mengelola sarana dan prasarana serta mengakses pendanaan untuk keberlanjutan kegiatan.

2. Pertukaran Pengetahuan

- Mendokumentasikan pencapaian hasil proyek (ringkasan kebijakan, kajian, pelajaran) dengan baik dan pastikan dokumen tersebut dapat diakses oleh semua pihak

- Hasil kajian, ringkasan kebijakan, dan dokumentasi pembelajaran disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat) untuk dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.



Bab 5.

Kesimpulan dan Rekomendasi



5.1 Kesimpulan

COREMAP-CTI yang dimulai tahun 2019 hingga tahun 2022 telah menghasilkan beberapa output dan outcome yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi, NGO, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari output dan outcome yang dihasilkan dari program COREMAP merupakan warisan yang perlu dijaga kelestariannya terutama untuk penyelamatan terumbu karang dan ekosistem terkait yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun di tingkat nasional.

Terdapat capaian penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kegiatan setelah program COREMAP berakhir, yaitu:

- 1) Implementasi rencana aksi nasional untuk spesies langka dan terancam punah oleh

COREMAP-CTI telah diakui oleh KKP dan memenuhi indikator yang diminta oleh Bank Dunia.

- 2) Beberapa kegiatan dalam RZWP3K Papua Barat telah dilaksanakan oleh COREMAP-CTI dan telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- 3) Pokmaswas telah terdaftar dan melakukan patroli rutin di TNP Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Papua Barat.
- 4) Infrastruktur ekowisata skala kecil telah selesai dibangun.
- 5) Empat KKP yang telah diidentifikasi akan memperoleh skor EVIKA yang lebih tinggi karena intervensi COREMAP-CTI.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang dihasilkan selama pelaksanaan program COREMAP-CTI, rekomendasi yang dibuat untuk menjaga keberlanjutan program setelah proyek berakhir adalah:

- 1) Kerja sama dengan instansi terkait perlu diperkuat dan dipertahankan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemantauan kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait.
- 2) Integrasi kegiatan dan aset ke dalam skema pembiayaan pemerintah daerah atau penganggaran

dan program desa merupakan salah satu strategi untuk memastikan keberlanjutan program yang dapat direplikasi ke proyek atau lokasi lain.

- 3) Data dasar penting untuk dapat menilai dampak proyek. Dengan demikian, identifikasi data dasar pada awal proyek harus ada dan konsisten dengan indikator yang akan dikembangkan dan diukur. Misalnya, rona awal kegiatan *IUU fishing* di KKP sasaran harus dikumpulkan selama desain kerangka hasil proyek untuk dapat dibandingkan dengan intervensi selama implementasi.

Capaian



Jumlah anggota kelompok pokmaswas

WB

Total | 92

Papua Barat | 50 NTT | 42



Jumlah Penerima manfaat

WB

Pemerintah daerah	6
Kelompok masyarakat	63
NTT	33
Papua Barat	30



Jumlah kelompok pokmaswas

WB

23



Infrastruktur / asset

WB

Pusat informasi wisata	3	Solar panel	9 Modules
Menara pengawas	6	Kapal pengawasan	9
Stasiun pemantauan pari	2	Alat pengawasan	18 Packages
Menara pantau cetacean	1	Alat pengolahan industr rumah tangga	6 Packages
Keramba jaring apung	2	Tools bycatch mitigasi	2 Packages
Hiking Track	1	Aplikasi online dan website	3
Dermaga apung	1	Cold storage	8



Pelatihan

WB

Jumlah Pelatihan	19
Jumlah modul pelatihan	23
Participants	552
Female	238
Male	314



Total luas area rehabilitasi

WB

Mangrove (m ²)	10.000 m ²
Lamun	1521 rumpun bibit
Terumbu karang	1600 fragmen karang



**LAPORAN
PENYELESAIAN
PROYEK**

Coral Reef Rehabilitation and
Management Program – Coral Triangle
Initiative (COREMAP-CTI) World Bank
2019 - 2022

